

ANALISIS HUBUNGAN DIPLOMASI DAGANG ANTARA INDONESIA-AUSTRALIA CEPA

Karya Tulis

Disusun untuk Memenuhi Tugas Akhir

Tahun Pelajaran 2021 – 2022



Oleh:

Nama : Sabilla Keisha Rifda

Kelas : XI IPS 1

No. Induk : 194033

**YAYASAN PEMBINA UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
SEKOLAH MENENGAH ATAS LABSCHOOL KEBAYORAN
JAKARTA SELATAN**

2022

LEMBAR PENGESAHAN

Nama : Sabilla Keisha Rifda
Kelas : XII IPS 3
No. Induk : 194033
Judul : **Analisis Hubungan Diplomasi Dagang antara Indonesia-
Australia CEPA**

Karya tulis ini telah dibaca dan disetujui oleh:

Pembimbing Teknik,



Maya Shafira, S.Pd.

Pembimbing Materi,



Murtiningsih, S.Pd.

Mengetahui,

Kepala SMA Labschool Kebayoran

Risang Danardana L.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan karya tulis yang berjudul “**Analisis Hubungan Diplomasi Dagang antara Indonesia-Australia CEPA**” dengan baik dan sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

Penulis tidak dapat diselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada:

1. Keluarga Penulis, atas dukungan, bantuan, dan memberikan arahan kepada penulis selama penulisan karya tulis ini.
2. Bapak Risang Danardana, selaku Kepala SMA Labschool Kebayoran.
3. Ibu Maya Shafira, selaku pembimbing teknik, atas dorongan dan semangat untuk menyelesaikan karya tulis ini.
4. Ibu Murtiningsih, selaku pembimbing materi, atas segala saran dan ilmu yang membantu penulis dalam menyelesaikan karya tulis ini.
5. Bapak Doni Handriansyah, selaku wali kelas penulis yang selalu memberi dukungan dan senantiasa mengingatkan penulis untuk menyelesaikan karya tulis ini
6. Tante Ayu Primatasari yang sudah menghubungkan penulis dengan pihak Konsulat Republik Indonesia di Darwin, Northern Territory, Australia.
Bapak Arief Wicaksono yang sudah bersedia menjadi narasumber dalam karya tulis ini.

Penulis memohon maaf apabila dalam pembuatan karya tulis ini masih terdapat banyak kekurangan, baik yang disengaja maupun tidak. Kritik dan saran yang membangun, penulis terima dengan baik untuk memperbaiki penulisan ini. Selebihnya penulis ucapkan terima kasih.

Jakarta, Agustus 2021

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	3
1.4 Kegunaan Penelitian.....	3
BAB II LANDASAN TEORI	5
2.1 Diplomasi Perdagangan.....	5
2.2 Negara Indonesia.....	6
2.3 Negara Australia.....	7
2.4 CEPA.....	8
2.4.1 Perjalanan Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA).	8
2.4.2 Tujuan dari IA- CEPA	9
2.4.3 Manfaat IA-CEPA bagi Kedua Negara.....	9
2.4.4 Peluang IA-CEPA	11
2.4.5 Sektor-Sektor IA-CEPA.....	12
2.5 Hubungan Bilateral Indonesia-Australia.....	14
2.5.1 Diplomasi Sepihak	15
2.5.2 Hubungan Ekonomi Indonesia-Australia.....	19

2.6 Kepentingan Nasional Indonesia dalam Penandatanganan Kerja Sama IA-CEPA	21
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	25
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian	25
3.2 Metode Penelitian.....	25
3.3 Objek Penelitian	25
3.4 Teknik Pengambilan Data	25
3.5 Teknik Analisis Data	26
BAB IV PEMBAHASAN.....	27
4.1. Deskripsi Data	27
4.1.1. Diplomat Darwin.....	27
4.1.2. Data Statistik	32
4.2. Analisis Data	38
BAB V PENUTUP.....	42
5.1. Kesimpulan.....	42
5.2. Saran.....	43
DAFTAR PUSTAKA	45
LAMPIRAN.....	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Menteri Luar Negeri RI, Presiden RI, Perdana Menteri Australia, Menteri Luar Negeri Australia setelah penandatanganan <i>Plan of Action of Indonesia-Australia Comprehensive Strategic Partnership</i> di Canberra, 10 Februari 2020.....	12
Gambar 2. Produk-produk ekspor Indonesia	14
Gambar 3. Penulis mewawancarai Bapak Arief Wicaksono	32
Gambar 4. Nilai Investasi dan Perdagangan Indonesia-Australia 2012-2019. Sumber : Kementerian Perdagangan, Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), 2020.	32
Gambar 5. Ekspor, Impor, Neraca Perdagangan Indonesia-Australia 2015-2019. Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020.	33
Gambar 6. Grafik Neraca Perdagangan Australia dari 1971-07 sampai 2021-06.	35
Gambar 7. Minat Investasi Australia di Sektor Jasa dan Non-Jasa.....	37

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Tarif Kuota.....	29
----------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ketegangan yang terjadi dalam hubungan diplomasi bilateral antara Indonesia dan Australia menjadi penyebab kerumitan hubungan Indonesia dengan negara tetangganya ini yang berpenduduk padat serta memiliki beragam budaya dan agama. Namun, pada kenyataannya, hubungan antarpemerintah kedua negara telah mengalami penguatan dalam kerja sama ekonomi dan sektor strategis lainnya. Hal tersebut dibuktikan dengan penandatanganan berbagai perjanjian dan kesepakatan oleh Indonesia dan Australia, baik yang bersifat bilateral maupun multilateral. Arus perdagangan bilateral semakin berkembang, bahkan Australia telah memberikan lebih dari \$600 juta dalam bentuk dana bantuan untuk Indonesia pada 2014-2015 (DFAT 2014b). Dalam berbagai tingkatan, hubungan Australia-Indonesia bersifat sangat interdependen. Ketergantungan ini berkembang dalam alur yang berbeda dibandingkan hubungan bilateral Australia dengan negara lainnya di kawasan ini disebabkan jarak dan tingginya arus mobilitas manusia antara Australia dan Indonesia.

Namun, hubungan yang dimiliki Indonesia – Australia dalam bidang perdagangan tidak begitu harmonis. Kedua negara ini tidak menjadikan negara tetangganya sebagai mitra utama perdagangan internasional. Hal tersebut cukup disayangkan karena jarak antar kedua negara yang sangat menguntungkan tidak dimanfaatkan dengan baik.

Untuk meningkatkan harmonisasi hubungan perekonomian, kedua negara bersepakat untuk meningkatkan nilai perdagangannya melalui kerangka kerjasama Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA). Kerjasama ini ditujukan untuk meningkatkan hubungan kedua negara dan menciptakan *win-win solution* untuk perdagangan kedua negara. Perjanjian ini juga diharapkan dapat digunakan dengan baik demi kepentingan kedua negara.

Australia merupakan salah satu negara yang menjadi mitra strategis Indonesia dalam bidang perekonomian. Terdapat berbagai kesempatan dan potensi yang dapat dimanfaatkan oleh Indonesia melalui kerja sama dengan negara maju ini, di antaranya investasi, pengembangan kapasitas, asistensi teknis, transfer pengetahuan dan teknologi, serta peningkatan standar kualitas tenaga kerja berstandar internasional.

Berdasarkan latar belakang di atas, IA-CEPA tidak sama dengan kerja sama yang telah dilakukan oleh Indonesia dan Australia sebelumnya. Kesepakatan perjanjian ini membutuhkan proses yang sangat panjang, tepatnya dari tahun 2010 sampai 2020 untuk benar-benar menyelesaikan pembentukan perjanjian ini. Penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana implikasinya terhadap kedua negara dan bagaimana perjanjian ini mampu memenuhi kebutuhan dan kepentingan Indonesia dan Australia.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, masalah yang akan dibahas adalah: Bagaimana implikasi IA-CEPA dalam mewujudkan realisasi perdagangan luar negeri bagi kedua negara ini?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Mengetahui keuntungan dan kerugian yang didapat Indonesia dalam Perjanjian IA-CEPA
2. Menganalisis kepentingan nasional Indonesia yang mempengaruhi Indonesia untuk menyepakati perjanjian IA-CEPA
3. Mengetahui langkah diplomatik yang dilakukan Indonesia dalam mempertahankan dan meningkatkan perjanjian IA-CEPA

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian dalam penulisan karya tulis ini adalah :

1. Bagi penulis

Untuk mengetahui bagaimana implikasi IA-CEPA dalam mewujudkan realisasi perdagangan luar negeri bagi kedua belah pihak negara ini.

2. Bagi pembaca

Untuk menambahkan wawasan kepada pembaca mengenai hubungan internasional yang dimiliki Indonesia dan Australia dalam mencapai perjanjian kerjasama IA-CEPA .

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Diplomasi Perdagangan

Diplomasi perdagangan merupakan salah satu bagian dari diplomasi ekonomi. Berridge menyatakan bahwa, “*Generally diplomacy (including economic diplomacy) is ‘the means by which states pursue their foreign policies’*” (Berridge 2002; 3). Diplomasi ekonomi adalah upaya untuk memperoleh keamanan ekonomi dalam sistem ekonomi internasional yang anarki. Diplomasi ekonomi didefinisikan sebagai penggunaan alat-alat diplomasi tradisional seperti pengumpulan informasi, *lobbying*, representasi, negosiasi, dan advokasi untuk kebijakan ekonomi luar negeri yang lebih lanjut (Barston 1997; Berridge 2002; Hamilton & Langhorne 1995; Jönsson and Hall 2005; Marshall 1997; Watson 1982). Dengan demikian, diplomasi ekonomi berfokus pada agenda ekonomi dalam diplomasi yang dapat dibedakan dari agenda politik. Hal ini tidak ada perbedaan dalam tipe diplomasi maupun aktor-aktor diplomasi.

(Kostecki & Naray, 2007) mengidentifikasi kegiatan rasional berikut untuk diplomasi perdagangan: 1) Kebutuhan akses untuk informasi bisnis yang *reliable* dan netral; 2) Dukungan untuk kredibilitas dan *image* yang lemah dari pendatang baru dalam pasar luar negeri; 3) Pencarian mitra: mendorong perusahaan nasional (terutama SMEs) untuk *go* internasional; 4) Penanganan konflik; 5) Dukungan untuk delegasi nasional: para menteri sering didampingi dalam kunjungan kenegaraan oleh kalangan bisnis; 6) Fokus strategis, seperti keinginan pemerintah

untuk tergabung dalam kebijakan perdagangan strategis, dukungan untuk kegiatan *research and development* atau meningkatkan akses suplai.

Lebih lanjut, Lee mendefinisikan diplomasi perdagangan sebagai penghubung lanskap diplomasi baru dan menjelaskan diplomasi perdagangan sebagai kerjasama dari network aktor publik dan swasta yang mengelola hubungan dagang menggunakan channel dan proses diplomasi (Donna & Hocking, 2010). Konsep yang paling berguna adalah *National Diplomatic System* (NDS). Konsep ini menangkap dengan baik diplomasi terkoordinasi yang beragam dan kompleks. Lead departemen pemerintah bekerjasama dengan partner seperti departemen lain dalam pemerintahan sebagaimana dengan kelompok bisnis dan kelompok sipil untuk menyampaikan tujuan-tujuan diplomasi.

2.2 Negara Indonesia

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, mengandung pengertian bahwa segala tatanan kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara adalah didasarkan atas hukum. Pernyataan negara hukum kemudian ditandai adanya lembaga yudikatif yang bertugas untuk menegakan aturan hukum.³ Sebagaimana diatur pada Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Kemudian pada Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan

peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Di dalam UU No 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman juga dikemukakan, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hak dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UU 1945 demi terselenggarakannya negara hukum RI.

2.3 Negara Australia

Australia adalah sebuah negara berparlemen yang merupakan anggota persemakmuran dari Inggris. Luas negara ini kurang lebih 76.000.000 km², yang beribukota di Canberra dan menggunakan mata uang Dollar Australia. Negara ini dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Negara ini termasuk dalam monarkhi parlementer-demokratis federal dalam lingkup Persemakmuran di Pasifik.

Australia adalah suatu benua yang terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, sedangkan di sebelah selatannya terletak Antartika dan di sebelah barat lautnya terletak Asia Tenggara. Dapat dikatakan bahwa letak Australia menyendiri dibandingkan dengan negara-negara yang lainnya, namun kalau diperhatikan letaknya lebih dekat dengan negara Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Australia jelas berbeda dengan negara-negara di sekitarnya, apalagi jika dilihat dari penduduknya yang secara fisik sangat berbeda dengan penduduk di wilayah sekitarnya, seperti penduduk di negara-negara kawasan Asia Tenggara. Karena secara ras, penduduk Australia merupakan keturunan dari ras kaukasoid.

2.4 CEPA

CEPA merupakan perjanjian ekonomi Indonesia-Australia yang bertujuan untuk meningkatkan taraf perdagangan bilateral antara kedua negara. CEPA berbeda dengan *Free Trade Agreement* (FTA) karena CEPA tidak hanya bertujuan untuk mengurangi hambatan perdagangan, tetapi juga mencakup area kerja sama yang jauh lebih luas, seperti investasi, bantuan ekonomi, serta kerja sama teknologi dan energi terbarukan sehingga kerja sama ini bersifat komprehensif. Rancangan kerja sama CEPA saling terhubung, terdiri dari: akses pasar, pengembangan kapasitas dan fasilitasi perdagangan, dan investasi. Oleh karena itu, CEPA adalah skema kerja sama ekonomi yang lebih luas dari isu perdagangan semata.

2.4.1 Perjalanan Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA).

Perjanjian IA-CEPA juga mengarah terhadap perjanjian perdagangan bebas (*free trade agreement*), tujuan dari IA-CEPA ini adalah untuk memperkuat dan memperluas ruang perdagangan, investasi, dan kerjasama ekonomi antara Australia dan Indonesia. Perjanjian IA-CEPA ini merupakan suatu kesempatan untuk menciptakan langkah perubahan dalam hubungan Indonesia dan Australia karena kedua negara akan memasuki suatu tahapan kerjasama dan hubungan baik yang belum ada di sejarah. Perjanjian Ekonomi komprehensif Indonesia Australia ini memiliki tujuan tiga rangkaian kegiatan yaitu: perdagangan; penanaman modal atau investasi; kerjasama yang memiliki kemampuan pembangunan (*capacity building*). Sektor yang telah disetujui pada praperundingan yang lalu, yaitu sektor agraria, pertambangan, jasa, serta perekonomian hijau.

2.4.2 Tujuan dari IA- CEPA

Pembentukan kerja sama IA-CEPA ini sebagai bentuk integrasi perekonomian Indonesia maupun Australia secara bilateral dan juga regional. Tujuan kerja sama ini adalah untuk membentuk pondasi yang kokoh di berbagai sektor seperti keamanan, lingkungan, pendidikan, hingga isu-isu transnasional, dan pada nantinya diharapkan dapat menciptakan iklim yang apik untuk pengembangan bisnis dan investasi di kedua negara. Hal tersebut mengakibatkan pelaku usaha dan investor selalu ikut andil selama perundingan berlangsung sebagai pihak yang memberikan masukan dan pilihan-pilihan alternatif kepada pemerintah. Kerja sama IA-CEPA ini dipandang bukanlah sebagai *free trade agreement* (FTA) biasa melainkan kearah kemitraan yang bersifat lebih komprehensif. Kemitraan antara Indonesia dan Australia ini diarahkan untuk dapat menjadi *economic powerhouse* yang merupakan kolaborasi dari kekuatan ekonomi untuk menjadi pendorong produktivitas sehingga dapat meningkatkan volume dasar ke pasar negara lainnya.

2.4.3 Manfaat IA-CEPA bagi Kedua Negara

Indonesia-Australia *Comprehensive Agreement* (IA-CEPA) merupakan perjanjian komprehensif yang berlaku sejak 5 Juli 2020. Selain mengatur komitmen penghapusan tarif untuk perdagangan barang antar kedua negara, IA-CEPA juga memuat komitmen untuk peningkatan kapasitas SDM, dan kerja sama jasa keuangan.

1. Melalui IA-CEPA, kedua negara bekerja sama dalam membangun suatu *economic powerhouse*. IA-CEPA membuka peluang bagi keduanya untuk

saling memanfaatkan keunggulan masing-masing. Contoh konkritnya, penggabungan antara bahan baku berkualitas seperti gandum dari Australia, dan pengolahan industri instan dari Indonesia. Sinergi ini dapat menjadikan Indonesia-Australia suatu *economic powerhouse* dalam industri pangan dunia. Selain menghasilkan produk unggulan untuk diekspor ke negara ketiga, kerja sama ini juga meningkatkan kontribusi bersama pada rantai pasok global.

2. Selain perdagangan barang dan jasa, IA-CEPA juga membuka potensi peningkatan arus investasi Indonesia-Australia. Sektor yang diharapkan terdorong oleh IA-CEPA yaitu infrastruktur, energi, pariwisata, pengolahan makanan, dan e-commerce.
3. Sektor pendidikan dan pelatihan juga merupakan elemen penting dalam IA-CEPA. Kerja sama ini diharapkan akan meningkatkan standarisasi produk yang akan diekspor dan sertifikasi profesi dalam pengembangan industri jasa di Indonesia.

Guna memonitor perdagangan, Indonesia dan Australia juga memperhatikan aspek *joint research* dan kemudahan akses data perdagangan. Seiring dengan kondisi geopolitis yang tidak menentu, sudah seyogyanya Indonesia memanfaatkan peluang IA-CEPA sedini mungkin.

2.4.4 Peluang IA-CEPA

Kerja sama konkrit dapat dilakukan dengan dukungan Perwakilan RI di luar negeri. Menindaklanjuti MOU ini, telah diidentifikasi beberapa kegiatan kerja sama konkret yang dapat dilakukan Kemlu dan Perwakilan RI, seperti:

1. Pertukaran dan pengolahan data operasional untuk memetakan potensi BUMN di luar dan dalam negeri.
2. Identifikasi peluang BUMN untuk mengikuti *government procurement* di negara asing, menjual jasa *Engineering, Procurement, Construction* (EPC), mengakuisisi asset dan/atau, menjalankan kegiatan *Build, Operate, Transfer* (BOT), atau melakukan distribusi atau penjualan produk.
3. Identifikasi peluang dan penguatan skema pembiayaan untuk mendorong BUMN *Go Global*.
4. Memfasilitasi dukungan atau perlindungan WNI/BHI bagi operasional BUMN.

Kerja sama ini diharapkan dapat menghilangkan sekat-sekat antar Kementerian, dan bahkan mempersingkat atau menghilangkan jalur-jalur birokrasi yang tidak diperlukan, sehingga dapat membantu percepatan pemulihan ekonomi Indonesia. Sebagai tindak lanjutnya, telah dilangsungkan pertemuan antara Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri dan Sekretaris Kementerian BUMN pada tanggal 24 Juli 2020. Pertemuan menyepakati koordinasi reguler antar Tim Teknis Kemlu-KemBUMN yang akan melibatkan PIC BUMN. Kementerian BUMN juga akan menunjuk PIC khusus untuk setiap BUMN yang siap *Go Global*. Nota

Kesepahaman ini juga terintegrasi dgn Perpres 82/2020 tentang Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

2.4.5 Sektor-Sektor IA-CEPA

Di bawah IA-CEPA, kedua negara juga telah membentuk *Economic Cooperation Program* (ECP) yang ditujukan untuk memaksimalkan manfaat IA-CEPA, mendukung perdagangan dan investasi, memperbaiki akses pasar, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif di Indonesia. Kerja sama ECP juga akan melibatkan pelaku industri di Indonesia maupun Australia.



Gambar 1. Menteri Luar Negeri RI, Presiden RI, Perdana Menteri Australia, Menteri Luar Negeri Australia setelah penandatanganan *Plan of Action of Indonesia-Australia Comprehensive Strategic Partnership* di Canberra, 10 Februari 2020

ECP memiliki 4 (empat) aktivitas utama yaitu

1. *IA-CEPA implementation*
2. *Agrifood Innovation Partnership*

3. *Powering Advanced Manufacturing*

4. *Co-investing in Skills and Training (TVET)*

Kegiatan ECP ditujukan untuk mencapai tiga hasil utama dalam sektor *agri-food*, manufaktur terkini, dan jasa. Tiga hasil utama tersebut adalah:

- *Greater market access:*

Mengimplementasi dan memaksimalkan manfaat dari IA-CEPA untuk mendukung akses pasar, meningkatkan perdagangan dan investasi, dan mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.

- *Better integrated access:*

Mendorong keterlibatan industri, menjaga kemitraan baru, dan bekerja sama dalam ekosistem *standard and conformance*, yang mendukung pengembangan sektor privat, kesetaraan gender, dan keterlibatan sosial.

- *Enhanced skills:*

Memajukan *skill* dan *training* dalam sektor privat dan Pemerintah Indonesia melalui linkage dan jalur penyampaian yang terkini, sehingga meningkatkan produktivitas dan daya saing.



Gambar 2. Produk-produk ekspor Indonesia

2.5

Hubungan Bilateral Indonesia-Australia

Indonesia merupakan salah satu negara yang berperan penting dalam ASEAN sehingga dengan posisinya yang dekat dengan Australia secara geografis dapat menjembatani perdagangan Australia dengan negara-negara ASEAN. Pentingnya Indonesia bagi Australia ini diperkuat dengan pernyataan Perdana Menteri Australia Tony Abbott pada acara penandatanganan plakat Australia-Indonesia Centre di Australia Parliament House, Canberra pada hari Rabu tanggal

13 November 2013 yang mengatakan bahwa “Kerjasama dengan Indonesia adalah hal yang sangat penting bagi kami. Hubungan kenegaraan Australia dengan Indonesia diawali menjelang kemerdekaan Indonesia 1945. Dukungan Pemerintah Australia terhadap kemerdekaan Indonesia yang telah dijajah selama 350 tahun oleh Belanda paling dirasakan antara 1942-1950.

Dalam hal hubungan perdagangannya kedua negara Indonesia dan Australia merupakan dua negara saling bertetangga yang mempunyai perbedaan yang mencolok terkait kebudayaan, tingkat kemajuan pembangunan, serta orientasi politik yang mengakibatkan perbedaan prioritas kepentingan. Hubungan antara kedua negara dalam berbagai bidang telah terjalin cukup erat, seperti dalam bidang pendidikan, budaya, dan perdagangan. Hal tersebut merupakan aset penting dalam hubungan kedua negara yang perlu terus dipupuk dan dikembangkan. Hubungan perdagangan antara Australia dan Indonesia pun telah lama terjalin. Persetujuan ASEAN-Australia-New Zealand *Free Trade Area* (AANZFTA) merupakan dasar bagi hubungan Indonesia-Australia, terutama dalam peningkatan perdagangan, ekonomi dan investasi.

2.5.1 Diplomasi Sepihak

Ketegangan dalam hubungan diplomatik antara Australia dan Indonesia kembali mencuat pada November 2013 menyusul pengungkapan kegiatan mata-mata Australia terhadap istri Presiden Yudhoyono dan penolakan permintaan maaf Perdana Menteri Australia atas langkah "yang terbaik bagi Australia" terkait keamanan warga Australia dan keamanan perbatasannya. Meski demikian, Perdana

Menteri menyatakan "penghormatan yang tinggi bagi Indonesia, pemerintahannya, dan masyarakatnya" serta menyatakan bahwa Indonesia adalah "negara yang memiliki hubungan paling penting dengan kita" (Abbott 2013).

Pernyataan Perdana Menteri dan kontroversi yang muncul dapat dianggap sebagai kesalahpahaman dalam penyampaian kata-kata semata, tetapi pernyataan itu juga menyoroti sejumlah perbedaan dalam memandang hubungan bilateral. Sikap keras Perdana Menteri terkait keamanan nasional sepenuhnya sejalan dengan diplomasi Australia yang pendekatannya berbasis agenda, tanpa mengakui bahwa kepercayaan Indonesia dalam hubungan bilateral itu telah rusak. Pada saat yang seharusnya menjadi waktu yang tepat untuk memperbaiki sikap saling pengertian, Menteri Luar Negeri Indonesia menyatakan bahwa aksi mata-mata itu sebagai "tindakan yang tidak bersahabat" dan memanggil pulang duta besarnya, tampaknya untuk mengkonsultasikan kepentingan nasional Indonesia ("Menlu"2013). Krisis akibat aksi mata-mata itu menyusul dua krisis diplomatik sebelumnya. Pada Juni 2011, di bawah pemerintahan Gillard, Menteri Pertanian secara tiba-tiba melarang ekspor sapi ternak ke Indonesia atas dasar praktik penyembelihan rumah potong hewan di Indonesia yang dinilai brutal. Herannya, pembatalan ini tidak didahului dengan konsultasi, sebagaimana yang disepakati dalam protokol diplomatik sekaligus sopan santun yang lazim. Indonesia menyatakan kemarahannya secara terbuka dan tidak segera menjalankan hubungan baik kembali sebagaimana mestinya. Selama kampanye pemilu federal Australia pada pertengahan 2013, pihak oposisi kala itu bersitegang dengan Indonesia terkait "pengembalian perahu-perahu pengungsi" dan, setelah memenangkan pemilu, mempersiapkan strategi

sepihak untuk melakukan hal itu. Ketika kapal-kapal Angkatan Laut Australia melintasi perbatasan laut Indonesia, protes-protes yang diajukan Indonesia pun diabaikan.

Saat krisis aksi mata-mata terjadi, pemerintah Indonesia, yang juga sedang bersiap menghadapi Pemilu 2014, maka siap merespons dengan keras dan terbuka. Dan pemerintah Indonesia memang melakukannya. Selama beberapa bulan berikutnya, Menlu Marty Natalegawa, yang memperoleh PhD-nya dari Australian National University, Canberra, menunjukkan keahlian diplomasi tingkat tinggi kepada Australia. Tidak ada bukti bahwa Pemerintah Australia menangkap pesan yang disampaikan. Dan ini bukan hal baru. Pada November 2001, setelah dukungan Australia terhadap kemerdekaan Timor Timur dan terpilih-nya kembali PM John Howard setelah kasus kapal Tampa, Presiden Megawati mendesak Howard untuk menghentikan "diplomasi megafon". Benang merah peristiwa-peristiwa itu adalah kejengkelan Indonesia atas pendekatan Australia yang sifatnya memaksa dan berbasis agendanya sendiri-apa yang penting untuk Australia saat ini, entah soal teroris, pencari suaka, rumah potong hewan, atau isu baru lainnya. Orang Indonesia menghargai sopan santun dan sensitif terhadap kesombongan, khususnya kesombongan yang bercorak neokolonial.

Meski kedua negara telah beranjak dari krisis aksi mata-mata, kita saat ini berada pada titik balik dalam hubungan Australia-Indonesia. Terlepas dari retorika pemerintah Australia mengenai pentingnya hubungan kedua negara, para pemimpin Indonesia telah kehilangan kepercayaan bahwa Australia dapat bersikap sesuai pernyataan itu. Pernyataan-pernyataan sesumbar tentang keutamaan kepentingan

nasional Australia tidaklah berguna. Pemerintah Indonesia juga mengutamakan kepentingan nasionalnya sendiri. Tantangan diplomatiknya bukanlah sekadar menegaskan kepentingan Australia, melainkan mengenali kepentingan bersama dan menegosiasikan hubungan berdasarkan sikap saling hormat serta percaya, yang memberikan ruang bagi kelenturan dan kerja sama. Dan tanggung jawabnya ada pada pundak Australia. Australia lebih membutuhkan kerja sama dari pihak Indonesia ketimbang sebaliknya. Seperti yang pernah dinyatakan mantan Menteri Luar Negeri Indonesia, Ali Alatas, "Australia itu kerikil di dalam sepatu Indonesia". Seperti halnya orang Australia, orang Indonesia juga memandang ke utara, bukan ke selatan.

Tantangan untuk melangkah menuju hubungan dengan Indonesia dalam tingkat yang lebih tinggi dalam beberapa hal sama dengan masalah rekonsiliasi dengan masyarakat Aborigin Australia. Para pemimpin Aborigin mengatakan dengan tegas bahwa pernyataan "menyesal", niat baik, dan tujuan baik tidaklah cukup bila pemerintah terus bersikap kasar, tanpa konsultasi memadai, tanpa partisipasi masyarakat Aborigin dalam pengambilan keputusan, dan tanpa pertimbangan layak atas perubahan kebijakan dan dampaknya (Pearson 2014). Minta maaf saja tidak cukup jika perilaku tidak berubah. Membangun hubungan baik dengan Indonesia dan dengan masyarakat Aborigin sama-sama membutuhkan kecakapan dan kemampuan di kalangan pemerintah, bisnis, dan akademika. Inilah rekomendasi pokok Buku Putih Abad Asia. Namun, hubungan yang baik juga membutuhkan kesadaran yang baik tentang bagaimana orang Australia berpikir dan merasa, serta bagaimana kita membangun dan mempertahankan hubungan dengan

"yang lain" berdasarkan sikap saling menghargai, saling percaya, dan adanya manfaat bersama. Untuk menjawab tantangan ini, orang-orang Australia perlu keluar dari zona nyaman mereka. Ujian yang menentukan adalah bagaimana menjawab tantangan pendidikan bahasa.

2.5.2 Hubungan Ekonomi Indonesia-Australia

Pertama, selama periode awal Indonesia, relasi ekonomi antara Australia dan Indonesia sangat terbatas, sebagian besarnya karena ekonomi Indonesia berada dalam kondisi kacau dan Indonesia masih terlalu miskin untuk mengembangkan relasi ekonominya. Pada saat yang sama, Australia masih sangat berorientasi ke Inggris, Eropa, dan Amerika Serikat. Ketika Suharto berhasil memperbaiki perekonomian Indonesia, transaksi bisnis ke bisnis yang sesungguhnya antara Australia dan Indonesia mulai berkembang. Jalur pembangunan Indonesia, khususnya pertumbuhan sektor manufaktur yang begitu cepat, dan sektor pertanian Australia yang tumbuh relatif stabil, juga mendorong perdagangan antara kedua negara. Namun, kualitas relasi diplomatik memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap perkembangan perdagangan kedua negara, sebagaimana yang terlihat dari dampak negatif integrasi Timor Timur ke Indonesia pada 1975 terhadap hubungan dagang kedua negara. Hubungan dagang menjadi makin kokoh ketika Indonesia melakukan Reformasi dan menjadi negara yang lebih demokratis, setelah jatuhnya Suharto tahun 1998. Pada era ini, fluktuasi perdagangan dan investasi sudah tidak terlalu bergantung pada hubungan diplomatik kedua negara.

Kedua, pada awal 2010-an, Australia menjadi salah satu mitra dagang penting bagi Indonesia, dan begitu juga sebaliknya, meskipun terdapat beberapa ketidakseimbangan dalam hubungan dagang ini. Peran Indonesia dalam perdagangan Australia tidaklah kecil, karena Australia menjadi negara kesembilan terbesar sebagai sumber komoditas impor Indonesia, sementara Indonesia menjadi negara terpenting kesebelas bagi Australia. Australia menjadi negara tujuan terpenting kesembilan untuk ekspor Indonesia, sementara, sebaliknya, Indonesia menduduki peringkat kesepuluh bagi Australia. Terlepas makna penting Australia bagi Indonesia dan sebaliknya, nilai perdagangan antara keduanya relatif lebih kecil dibandingkan perdagangan masing-masing dengan mitra-mitra utama mereka lainnya, seperti Cina, Jepang, dan Amerika Serikat. Situasi ini mungkin disebabkan karena kedua negara memiliki komoditas ekspor utama yang relatif sama, khususnya yang dihasilkan dari sektor tambang, dan karena adanya fakta bahwa Indonesia hanya mencatat keberhasilan kecil dalam pengembangan sektor manufakturnya. Dengan demikian, meski ada peningkatan yang cukup besar dalam nilai ekspor Australia ke Indonesia, Australia mungkin tidak akan pernah menjadi mitra dagang utama Indonesia, bahkan tidak masuk dalam empat besar, demikian juga sebaliknya.

Ketiga, investasi langsung yang dilakukan kalangan bisnis Australia di Indonesia termasuk penting, tetapi masih relatif lebih kecil dibandingkan dengan Singapura, Jepang, Inggris, dan Rusia. Investasi langsung oleh pihak Indonesia di Australia juga sangat kecil, dan tampaknya akan tetap kecil.

Keempat, pelajar dan mahasiswa Indonesia menjadi sumber devisa asing yang penting bagi Australia, sebagaimana halnya turis Australia bagi Indonesia. Turis Australia merupakan kelompok turis ketiga terbesar yang datang ke Indonesia, meski sebagian besar hanya berkunjung ke Bali. Setelah mengamati kesamaan-kesamaan dalam struktur dasar ekonomi kedua negara, kami cukup pesimistis dengan potensi pertumbuhan perdagangan dan investasi yang substansial antara kedua negara dalam waktu dekat. Namun, masih ada banyak ruang untuk meningkatkan nilai perdagangan dan investasi bilateral, khususnya dalam beragam sektor jasa yang kini mendominasi perekonomian kedua negara. Masih terdapat banyak ruang pula untuk meningkatkan jumlah turis Australia ke Indonesia dan siswa Indonesia ke Australia. Kerja sama yang lebih dekat antara kedua negara dalam kedua sektor ini, biar bagaimanapun, tetap dibutuhkan.

2.6 Kepentingan Nasional Indonesia dalam Penandatanganan Kerja Sama IA-CEPA

Negara memiliki kewenangan untuk mengeluarkan kebijakan untuk mencapai suatu kepentingan nasional. Salah satu bentuk kebijakan yang dapat dibuat adalah melakukan kerja sama dengan negara lain. Sebelum kerja sama terbentuk, pihak yang terlibat di dalamnya harus melakukan perundingan terlebih dahulu untuk menyelaraskan kepentingan di dalam kerja sama sehingga keuntungan dari kerja sama bisa didapatkan oleh kedua belah pihak.

Di dalam proses menjalankan suatu perundingan di dalam kerja sama, terdapat perhitungan kerugian dan keuntungan negara. Suatu kerja sama idealnya menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya, memiliki potensi kerugian minimum, serta dapat mengakomodir kepentingan nasional negara. Dalam meningkatkan perekonomiannya, Indonesia bekerja sama dengan berbagai negara di sekitarnya. Kerja sama tersebut dapat bersifat multilateral, di antaranya ASEAN atau AANZFTA, dan bersifat bilateral, seperti Indonesia dengan Australia membentuk IA-CEPA. (Allizon, 1971)

Perundingan kerja sama berbasis ekonomi antara Indonesia dan Australia yang disebut IA-CEPA sempat terhenti akibat adanya konflik politik yang terjadi pada tahun 2013 hingga 2016. Pada tahun 2016, Australia mengunjungi Indonesia dengan agenda diplomasi untuk mengaktifkan kembali kerja sama IA-CEPA. Dalam menentukan pilihannya sebagai bentuk suatu kebijakan luar negeri, terdapat tiga hal penting yang menjadi faktor penentu pilihan mana yang kemudian akan dipilih oleh negara, yakni tujuan, pilihan atau alternatif yang tersedia, dan konsekuensi. Indonesia harus memperhitungkan kerugian dan keuntungannya dari masing-masing pilihan yang diambilnya.

Pertimbangan Indonesia dalam menyetujui perjanjian IA-CEPA ini ialah pada tahun 2016, rasio perdagangan PDB Indonesia paling kecil apabila dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN, padahal luas wilayah Indonesia paling besar (Harnas, 2017). Pada tahun yang sama pula, ekspor kelapa sawit Indonesia sedang menurun dan pasarnya pun cenderung stagnan. Meskipun neraca

perdagangan Indonesia di tahun 2016 mengalami surplus sebesar 8.78 miliar US\$, yang menunjukkan peningkatan dari tahun 2015 yang surplusnya \$7.67 miliar, nilai total ekspor di tahun 2016 masih lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut menunjukkan perekonomian Indonesia belum sepenuhnya membaik karena masih adanya ketimpangan ekspor dan impor. (Istiqamah, 2014).

Apabila perekonomian belum membaik, investor tidak akan menargetkan Indonesia untuk melakukan investasi berskala besar. Hal ini berdampak pada proses pembangunan di Indonesia yang melambat. Padahal, di tahun 2016, Presiden Joko Widodo sedang massif melakukan pembangunan khususnya infrastruktur di Indonesia seperti pembangunan MRT, LRT, jalan bebas hambatan di Pulau Sumatera dan sepanjang Pulau Jawa, dan pembangunan-pembangunan lainnya yang juga membutuhkan dana investasi dari luar (FDI). Didasarkan keinginan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, aktivitas ekspor ke negara Australia kembali diaktifkan untuk mendapatkan pasar baru dan meningkatkan aliran investasi di Indonesia. (Allizon, 1971)

Oleh karena itu, alasan Indonesia mengaktifkan kembali IA-CEPA adalah demi kepentingan peningkatan ekonomi nasional. Namun, terdapat kerugian yang dapat ditanggung oleh Indonesia dari keputusan pengaktifan IA-CEPA, yaitu kemungkinan terjadinya impor daging sapi dan produk pertanian secara massif ke pasar Indonesia. Maka, Indonesia harus berhati-hati untuk mengatur impor untuk menjaga neraca perdagangan Indonesia. (Chrismonita, 2020). Meningkatkan nilai ekspor dibandingkan impor juga berguna untuk mengurangi tingkat ketergantungan

Indonesia terhadap suatu komoditas impor. Namun, meskipun kepentingan utamanya adalah kepentingan ekonomi, terdapat pula kepentingan tersirat di dalamnya yakni kepentingan politik. Dukungan politik dari pihak luar atas beberapa isu tertentu di Indonesia diperlukan pula oleh Indonesia agar bisa mempermudah untuk mencapai tujuannya.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu penelitian dilakukan pada bulan April 2021. Penelitian dilakukan di Jakarta.

3.2 Metode Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan adalah kajian pustaka dan wawancara. Penulis mengumpulkan informasi maupun data dari berbagai referensi seperti; buku, jurnal, internet, dan wawancara kepada narasumber terkait.

3.3 Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penulisan karya tulis ini adalah diplomasi dagang yang dilakukan oleh Indonesia dan Australia

3.4 Teknik Pengambilan Data

Teknik pengambilan data dalam karya tulis ini adalah kajian pustaka dan wawancara. Penulis melakukan wawancara dengan narasumber yang berhubungan dengan penelitian ini.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif, yaitu data hasil penelitian yang didapat akan dijabarkan dalam bentuk paragraf.

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Data

4.1.1. Diplomat Darwin

Pada hari Minggu, 21 Maret 2021, penulis berkesempatan untuk mewawancarai Arief Wicaksono, diplomat dari Darwin, Australia. Bapak Arief menjelaskan bahwa penyelesaian IA-CEPA ini merupakan tonggak sejarah baru dalam hubungan ekonomi Indonesia – Australia. IA-CEPA bukanlah *free trade agreement* (FTA) biasa, melainkan sebuah kemitraan komprehensif di bidang perdagangan barang, jasa, investasi, dan kerja sama ekonomi. “Pada umumnya, FTA hanya menegosiasikan akses pasar, tetapi perjanjian CEPA dengan Australia ini juga mencakup kerja sama kedua negara agar dapat tumbuh bersama memanfaatkan kekuatan masing-masing untuk menciptakan kekuatan ekonomi baru di kawasan” jelas Enggartiasto Lukita (Menteri Perdagangan RI) pada 31 Agustus 2018.

IA-CEPA memberikan kemudahan akses pasar di Australia dengan komitmen pembebasan tarif bea masuknya menjadi 0% untuk seluruh pos tarif komoditas, pengurangan hambatan nontarif, fasilitasi perdagangan, serta berbagai kemudahan untuk mengakses pasar jasa dan investasi di berbagai sektor. Dalam kesepakatan IA-CEPA, Indonesia juga mendapatkan komitmen yang tidak diberikan oleh negara mitra Australia lain, antara lain sebagai berikut :

1. Kemudahan akses pasar otomotif khususnya mobil listrik dan *hybrid*;
2. Penambahan kuota visa kerja dan liburan menjadi lima ribu per tahun secara bertahap untuk warga negara Indonesia;
3. Investasi Australia dalam pendidikan vokasional dan pendidikan tinggi sehingga lulusan Indonesia dapat memiliki standar internasional;
4. Program pemagangan dan jaminan visa untuk dua ratus orang per tahun di perusahaan-perusahaan Australia;
5. Program pertukaran tenaga kerja ahli ke Australia agar tenaga kerja ahli Indonesia dapat meningkatkan keahliannya;
6. Komitmen untuk mencapai *mutual recognition agreement* di profesi insinyur;
7. Kerja sama ekonomi yang terukur dan berkelanjutan/jangka panjang di berbagai sektor, contohnya pada sektor pangan (*grain partnership, red meat partnership, food innovation center*)

Adanya kesepakatan IA-CEPA meningkatkan akses Australia ke Indonesia yang pada realisasinya meliputi:

- 1) Penghilangan atau pengurangan tarif barang;

2) Peningkatan akses bagi penyedia jasa dan investor ke pasar Indonesia. Melalui yang disebut dengan Tariff Rate Quota (TRQ), para eksportir Australia mendapatkan akses tarif preferensial ke Indonesia untuk sejumlah produk tertentu. Dengan kata lain, beberapa produk Australia yang seharusnya dikenakan tarif ke Indonesia menjadi bebas bea atau di bawah tarif berdasarkan TRQ yang dibuat. Adapun produk-produk yang dimaksud meliputi sapi jantan hidup, kentang, wortel, jeruk, pakan biji-bijian, dan lain sebagainya.

Tahun	<i>Quantity of the Tariff Rate Quota (head of cattle)</i>	<i>In-quota tariff</i>	<i>Out-of-quota tariff</i>
1	575,000	0%	2.5%
2	598,000	0%	2.5%
3	621,920	0%	2.5%
4	646,797	0%	2.5%
5	672,669	0%	2.5%
6 onwards	700,000	0%	2.5%

Tabel 1 : Tarif Kuota

Saat ini, bentuk kerja sama yang sedang dijajaki ialah diplomasi untuk memasukan kopi lokal (*speciality coffee*) ke pasar Australia. Selain itu, produk jamu Indonesia juga berpotensi untuk diimpor ke Australia karena tingkat permintaan yang tinggi. Hal ini disebabkan banyaknya masyarakat Indonesia di Australia yang tersebar di berbagai kota.

Penandatanganan dan pengesahan komprehensif Indonesia-Australia Perjanjian Kemitraan Ekonomi (IA-CEPA) sebagian besar diambil alih oleh kesehatan masyarakat dan krisis ekonomi yang disebabkan oleh pandemi COVID-19.

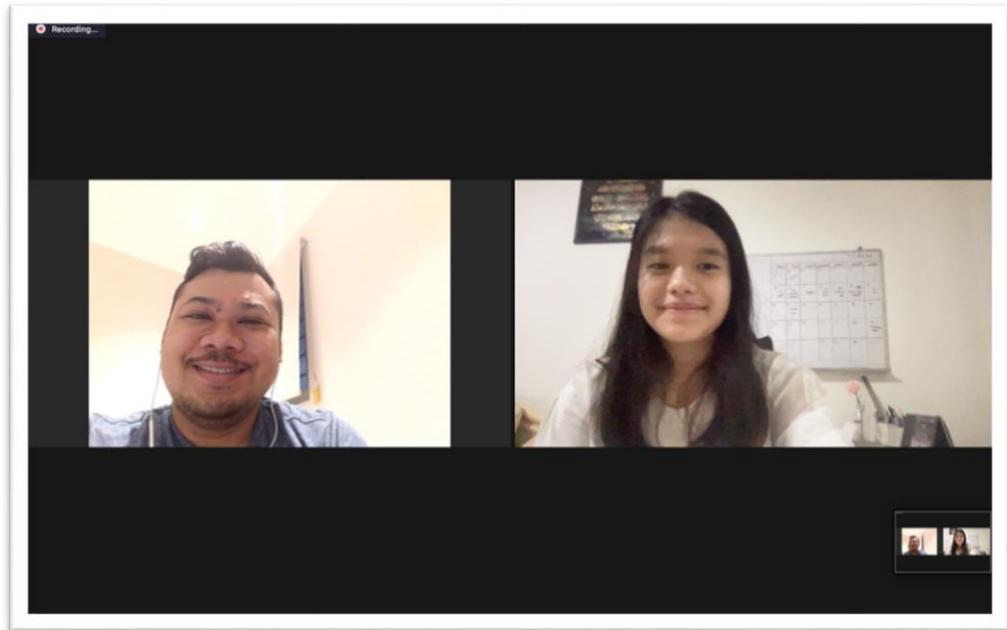
Tugas kedua negara adalah menemukan cara untuk menjaga momentum yang baik, terutama selama pandemi, serta mencari peluang untuk mengembangkan hubungan pascapandemi. Oleh karena itu, Australia perlu merespons berbagai tantangan yang dihadapi selama pandemi dengan meniti kerja sama dengan Indonesia dan negara Asia Tenggara lainnya. Diperlukan pula respons Pemerintah Indonesia yang kuat dan terkoordinir untuk mengatasi dampak langsung dan jangka panjang pandemi, khususnya pada kesehatan masyarakat dan seterusnya pembangunan sosial dan ekonomi. Pengalaman pandemi tidak diragukan lagi akan mengungkapkan bidang-bidang baru yang saling menguntungkan kemitraan antara Australia dan Indonesia. Hal ini juga menunjukkan pentingnya upaya memperdalam bidang kolaborasi yang ada serta menindaklanjuti hal yang telah

direncanakan, tetapi tertunda karena pandemi, khususnya berkaitan dengan kerangka IA-CEPA.

Kemitraan baru Indonesia-Australia diarahkan untuk membentuk *economic powerhouse* di kawasan Asia dengan menggabungkan kapabilitas kedua negara dengan prinsip dasar kemitraan yang saling menguntungkan. Kemitraan ini akan memperkuat hubungan ekonomi Indonesia dan Australia dalam jangka waktu yang panjang.

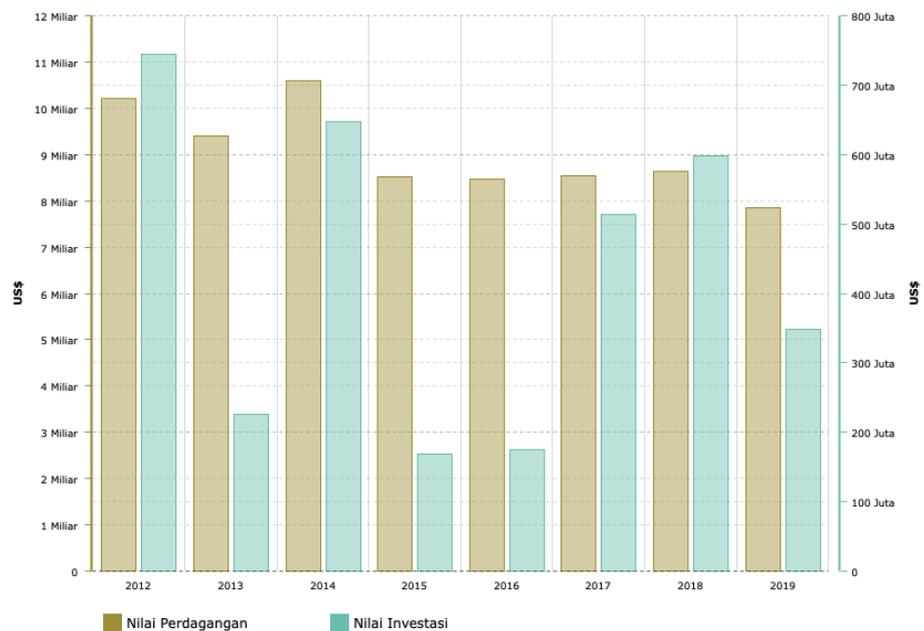
Kontribusi yang dapat dilakukan sebagai warga negara dalam menyukseskan perjanjian IA-CEPA ialah dengan membiasakan penggunaan produk lokal. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan nilai produk buatan dalam negeri sehingga membuka peluang baru dalam kemitraan dengan negara lain, khususnya Australia. Selain itu, mengutamakan pariwisata dalam negeri juga dapat meningkatkan

perkembangan daerah sehingga antusiasme turis mancanegara turut bertambah media sosial.



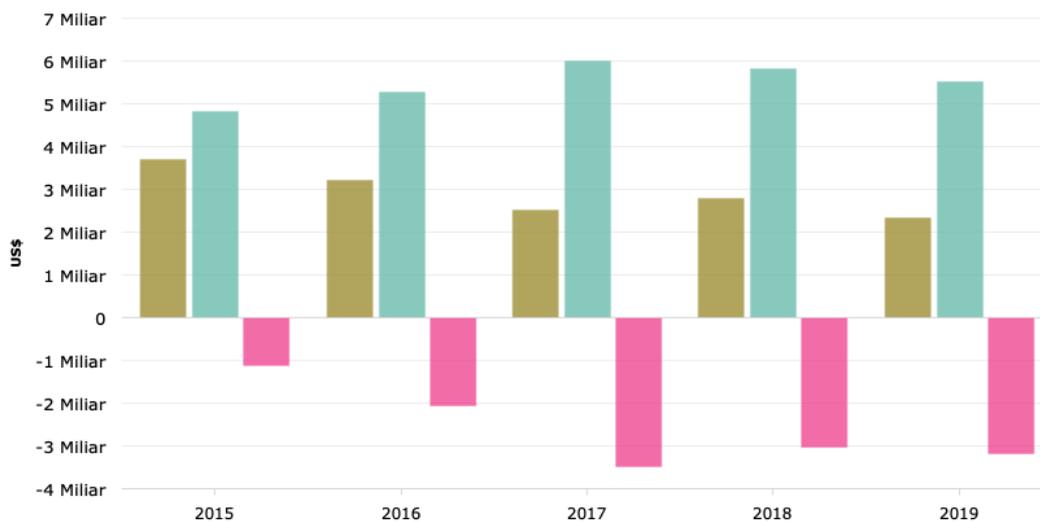
Gambar 3. Penulis mewawancarai Bapak Arief Wicaksono

4.1.2. Data Statistik



Gambar 4. Nilai Investasi dan Perdagangan Indonesia-Australia 2012-2019. Sumber : Kementerian Perdagangan, Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), 2020.

Nilai perdagangan Indonesia dan Australia pada 2019 menurun dari tahun sebelumnya. Pada 2018, total ekspor dan impor kedua negara ini sebesar US\$7,8 miliar. Nominal tersebut menunjukkan penurunan 9,12% dari tahun sebelumnya yang mencapai US\$8,6 miliar. Selain itu, defisit neraca perdagangan Indonesia-Australia juga semakin melebar, mencapai US\$3,2 miliar pada tahun lalu. Hal yang sama juga terjadi pada nilai investasi Australia ke Indonesia. Pada 2018, nilai investasi dari Australia mencapai US\$ 597,4 juta. Namun, pada 2019, nilai tersebut menurun sampai US\$ 348,2 juta.

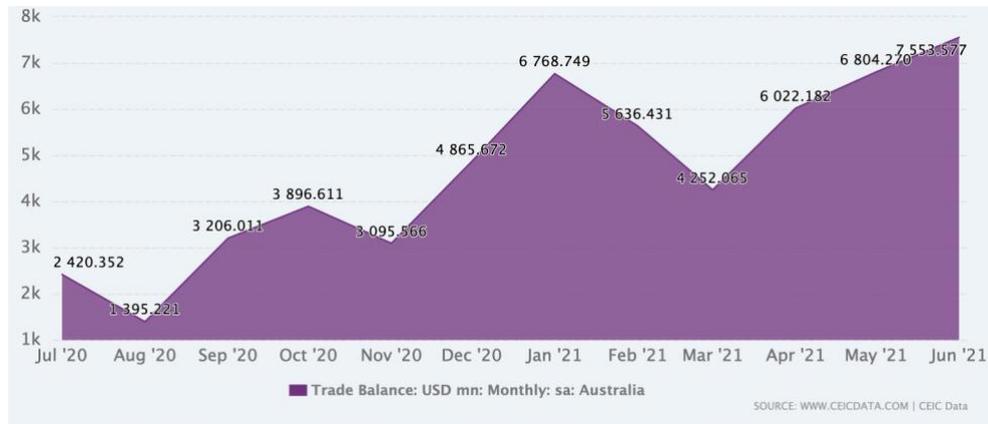


Gambar 5. Ekspor, Impor, Neraca Perdagangan Indonesia-Australia 2015-2019.
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020.

Diagram di atas menunjukkan neraca perdagangan Indonesia dan Australia yang kian melebar. Tercatat pada 2019, neraca perdagangan tersebut bernilai US\$3,2 miliar, menunjukkan kenaikan 5,5% dari tahun sebelumnya yang bernilai US\$3 miliar. Hal ini disebabkan nilai impor yang lebih besar daripada nilai ekspor. Impor dari Australia sebesar US\$5,5 miliar, sedangkan ekspor hanya sebesar US\$2,3 miliar.

Dengan menganalisis data ini, diketahui terjadi peningkatan defisit pada neraca perdagangan antara Indonesia dan Australia. Jika kondisi defisit neraca perdagangan ini tidak disikapi dengan bijak, Indonesia berpotensi untuk mengalami kerugian besar berupa masuknya barang impor secara berlebih sehingga merusak keberadaan industri lokal, pelemahan nilai rupiah yang berpotensi menimbulkan inflasi, serta lonjakan pengangguran karena banyak industri yang tutup.

Pemerintah Indonesia mengatasi defisit neraca perdagangan dengan melakukan kerja sama dagang IA-CEPA untuk perlahan mengurangi kerugian tersebut. Dengan IA-CEPA, Indonesia memang memberikan fasilitas penghapusan tarif bea masuk hingga mencapai 0%, tetapi regulasi ini turut mencakup mekanisme perdagangan yang mampu memitigasi impor produk Australia ke Indonesia yang berlebih.



Gambar 6. Grafik Neraca Perdagangan Australia dari 1971-07 sampai 2021-06

Neraca perdagangan Australia dilaporkan mencapai angka US\$7.6 pada Juni 2021. Hal tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan bulan sebelumnya, yang bernilai sebesar US\$6.8. Data neraca perdagangan Australia diperbarui setiap bulannya dengan rata-rata -28.2 USD dari 1971-07 sampai 2021-06, dengan total 600 observasi. Data ini mencapai angka tertinggi sebesar 7.6 USD bn pada 2021-06 dan rekor terendah sebesar -3.2 USD.

IA-CEPA memiliki kelebihan dari CEPA/FTA lainnya dengan "*early outcomes*" yaitu kerja sama yang diimplementasikan tanpa menunggu selesainya perundingan. *Early outcomes* disusun berdasarkan saran para pemangku kepentingan dari berbagai bagian integral dari IA-CEPA:

- **Herbisida dan Pestisida**

Preferensi tarif bea masuk 0% dari sebelumnya 5%, sehingga dapat berkompetisi dengan Malaysia, dan China yang telah mendapatkan tarif 0%.

- **Indonesia-Australia Business Partnership Group**

Terdiri dari para pelaku usaha (KADIN, APINDO, AIBC) yang telah memberikan rekomendasi berharga selama putaran perundingan IA-CEPA.

- **Jasa Keuangan**

Kerja Sama OJK dengan Australian Centre for Financial Studies (ACFS) melalui joint research, capacity building, joint seminars dan workshop.

- ***Read Meat and Cattle***

Kerja sama yang sudah dirintis sejak 2013 membantu Indonesia mewujudkan swasembada sapi melalui investasi di bidang peternakan sapi di Indonesia

- ***Indonesia Food Innovation Center (IFIC)***

Didirikan tahun 2016 untuk mendukung industri makanan olahan, dengan melibatkan GAPMMI, CSIRO-Indonesia, BIC, Kemenperin, Kemenristekdikti

- ***Fashion and Jewellery Design***

Pelatihan, business matching, pameran bagi fashion & jewellery designer Indonesia untuk membuka peluang penetrasi ke negara ketiga

- ***Drug and Food Standard dan Herbal/Spa/Aroma Therapy***

Kerja sama yang melibatkan BPOM, BSN, Bappenas, Industri farmasi, & Industri herbal dengan Therapeutic Goods Administration (TGA) di bidang standard.

Peluang Peningkatan Investasi

Statistik DFAT (Department of Foreign Affairs and Trade) mencatat realisasi investasi Australia ke Indonesia dari 2015 hingga 2019 mencapai 1.7 miliar USD. Dengan adanya IA-CEPA, perjanjian ini akan menciptakan iklim investasi baru yang lebih kondusif bagi investor Australia dan menargetkan sektor-sektor baru yang belum tersentuh, seperti pendidikan tinggi, rumah sakit, pariwisata, pertambangan, energi, dan sebagainya. Hal ini juga berlaku bagi para investor Indonesia yang berminat untuk menanam modal di Australia untuk bidang industri teknologi digital, kesehatan, agrikultur dan *advance manufacturing*.



Gambar 7. Minat Investasi Australia di Sektor Jasa dan Non-Jasa

4.2. Analisis Data

Dalam perjanjian IA-CEPA, Indonesia dan Australia terikat kontrak untuk bekerja sama dalam bidang ekonomi, tetapi tetap menghargai independensi masing-masing negara dalam mengurus keperluan internalnya.

Penulis menganalisis hasil wawancara dengan narasumber terkait sebagai berikut:

1. Implementasi perjanjian IA-CEPA dalam realisasi perdagangan antara kedua negara ini dapat dilihat penambahan impor sapi. Namun, kesepakatan ini masih harus diratifikasi parlemen kedua negara untuk membebaskan 100% produk ekspor Indonesia ke Australia—yang mencapai 6.474 pos tarif—sementara 94% pos tarif ekspor Australia ke Indonesia dibebaskan secara bertahap. Pasalnya, Indonesia adalah pasar produk pertanian terbesar keempat, yang tahun 2017 bernilai 3,35 miliar dolar AS. Dengan pembebasan pasar, Australia memperkirakan impor sapi yang dikuota 575.000 ekor oleh Indonesia akan tumbuh 4% tiap tahunnya hingga menjadi 700.000 ekor dalam lima tahun.
2. Untuk saat ini, bentuk kerja sama yang sedang dijajaki ialah diplomasi untuk memasukan kopi lokal (*speciality coffee*) ke pasar Australia. Selain itu, produk jamu Indonesia juga berpotensi untuk diimpor ke Australia karena tingkat permintaan

yang tinggi. Hal ini disebabkan banyaknya masyarakat Indonesia di Australia yang tersebar di berbagai kota.

3. Setelah dilakukan penandatanganan dan pengesahan perjanjian kemitraan ekonomi IA-CEPA, sebagian besar dana dipergunakan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan memulihkan krisis ekonomi yang disebabkan pandemi COVID-19. Hubungan bilateral Indonesia dan Australia tetap kuat, bahkan semakin erat dalam masa pandemi ini. Selain itu, terdapat peningkatan kerja sama dalam perdagangan dan investasi pada kuartal pertama 2020. Kegiatan ekspor dan impor mengalami peningkatan, masing-masing sebesar 7,67 persen dan 21,3 persen. Hubungan investasi pada periode yang sama juga menunjukkan peningkatan hingga 31,9 persen. Namun, kedua negara tetap harus mengantisipasi kemungkinan terjadinya penurunan perdagangan dan investasi pada kuartal berikutnya hingga pandemi COVID-19 berakhir. Perlu dilakukan persiapan ekonomi agar hal ini tidak berdampak buruk terhadap perekonomian kedua negara dan perjanjian bilateral IA-CEPA.
4. Indonesia dan Australia harus menaati segala ketentuan yang sudah ada dalam perjanjian agar tidak muncul konflik dalam perealisasiannya. Selain itu, kedua negara ini juga harus memberikan kontribusi aktif agar kerja sama ini dapat

membuahkan hasil yang diinginkan serta menjaga juga meningkatkan kondisi ekonomi kedua negara. Indonesia dan Australia juga harus terus berusaha untuk mengembangkan sektor potensial agar kerja sama memiliki nilai positif yang kian bermanfaat.

5. Sebagai warga negara, kontribusi yang dapat dilakukan dalam menyukseskan perjanjian IA-CEPA ialah dengan meningkatkan penggunaan produk lokal sehingga daya produksi dan daya jual dapat meningkat. Dengan demikian, semakin banyak produk nasional yang akan bermutu tinggi, layak ekspor, serta diminati dunia internasional.
6. Berdasarkan data statistik yang tertera, nilai perdagangan antara Indonesia-Australia menurun dari tahun sebelumnya. Hal yang sama juga terjadi pada nilai investasi Australia ke Indonesia. Begitu pula neraca perdagangan antara Indonesia-Australia yang mengalami peningkatan defisit pada tahun 2019.
7. Pada bulan April 2021, neraca perdagangan Australia dari perjanjian IA-CEPA dilaporkan mengalami peningkatan dibandingkan bulan sebelumnya.

8. IA-CEPA memiliki kelebihan dibandingkan CEPA/FTA lainnya dengan "*early outcomes*", yaitu kerja sama yang diimplementasikan tanpa menunggu selesainya perundingan. *Early outcomes* disusun berdasarkan kesepakatan para pemangku kepentingan dari berbagai bagian integral dari IA-CEPA Indonesia-Australia, yaitu *Business Partnership Group*, *Jasa Keuangan*, *Read Meat and Cattle*, *Indonesia Food Innovation Center (IFIC)*, *Fashion and Jewellery Design*, dan *Drug and Food Standard dan Herbal/Spa/Aroma Therapy*.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

IA-CEPA adalah persetujuan ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Australia dengan prinsip dasar kemitraan yang saling menguntungkan secara berimbang. Tujuan dari IA-CEPA adalah untuk memperkuat dan memperluas ruang perdagangan, investasi, dan kerja sama ekonomi antara Australia dan Indonesia. Salah satu bentuk kesepakatan yang sangat menguntungkan bagi kedua negara adalah dihapuskannya batasan tarif baik di Indonesia maupun Australia. Oleh karena itu, perjanjian kerja sama IA-CEPA ini berpotensi dalam mempertahankan keberlangsungan kinerja para pelaku usaha dan meningkatkan kualitas produk Indonesia. Perjanjian ini diharapkan dapat membantu Indonesia yang kini tengah berjuang memulihkan perekonomiannya nasionalnya.

Berdasarkan data yang penulis analisis, implementasi perjanjian IA-CEPA dalam realisasi perdagangan antara kedua negara ini dapat dilihat dari penambahan impor sapi. Selain itu untuk saat ini, bentuk kerja sama yang sedang dijajaki ialah diplomasi untuk memasukan kopi lokal (*speciality coffee*) dan jamu ke pasar Australia. Sebagai warga negara, kontribusi yang dapat dilakukan dalam menyukseskan perjanjian IA-CEPA ialah dengan meningkatkan penggunaan produk lokal sehingga daya produksi dan nilai jual dapat meningkat.

5.2. Saran

Saran penulis untuk beberapa pihak berdasarkan karya tulis ini adalah sebagai berikut :

- Pemerintah :
 1. Pemerintah Indonesia harus dapat mengimbangi antara impor produk dari Australia dengan produk lokal yang ada di Indonesia. Karena kepentingan nasional utama dalam perjanjian ini adalah mencapai kesejahteraan ekonomi, Indonesia harus dapat meningkatkan kualitas produksi maupun sumber daya manusia agar volume ekspor juga dapat meningkat secara signifikan. Selain itu, perlu diatur secara lebih terperinci dan komprehensif mengenai regulasi impor dari Australia agar neraca perdagangan Indonesia-Australia tidak lagi mengalami defisit.
 2. Pemerintah Indonesia harus lebih selektif dalam mengelola potensi ekspor pasca IA-CEPA. Impor daging sapi dan sapi hidup perlu diantisipasi sedemikian rupa agar tidak mematikan potensi sapi lokal. Sebaliknya, ekspor sebaiknya ditingkatkan untuk memperbaiki kualitas bibit sapi yang dalam jangka panjang mampu mendorong swasembada daging sapi secara nasional.

- Masyarakat :
 1. Dengan berlakunya perjanjian IA-CEPA, diharapkan seluruh pelaku usaha tetap produktif dan memanfaatkan perjanjian ini dengan

sebaik-baiknya. Harapannya, perjanjian ini dapat mempercepat laju ekspor sehingga produk Indonesia lebih berdaya saing. Meskipun barang yang akan diekspor ke Australia tidak dikenakan bea masuk (0%). Namun, pelaku usaha tetap harus memperhatikan persyaratan ekspor diantaranya regulasi dan pemahaman standar mutu yang diberlakukan oleh negara tujuan atau pengimpor

DAFTAR PUSTAKA

MISSBACH, Antje dan Jemma Purdey. 2017. *Linking People: Pertalian dan Interaksi Orang Australia dan Orang Indonesia*. Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia)

Andre, Andriani dan Yeti. 2017. *Implikasi Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (IA-CEPA) terhadap Perdagangan Luar Negeri Indonesia*. *Andalas Journal of International Studies*.

Kementerian Luar Negeri RI, Tim Percepatan Pemulihan Ekonomi. 2020. *Diplomedia Ekonomi Agustus 2020 Edisi 1.0*.

Septian Nur Yekti. 2018. *DIPLOMASI PERDAGANGAN INDONESIA DALAM RANTAI PERTAMBAHAN NILAI GLOBAL PRODUK TEKSTIL KE PASAR TIMUR TENGAH*. Yogyakarta.

Astari Marisa. 2020. *HUBUNGAN BILATERAL INDONESIA-AUSTRALIA: KEPENTINGAN AUSTRALIA DALAM MERATIFIKASI INDONESIA-AUSTRALIA COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT TAHUN 2019*.

Direktorat Perundingan Bilateral Ditjen. Perundingan Perdagangan Internasional
Kementerian Perdagangan

<http://repository.unpas.ac.id/41487/>

<https://www.dilmil->

balikpapan.go.id/file/renstra/RENSTRA%20DILMIL%20BALIKPAPAN.pdf

<http://eprints.uny.ac.id/19313/3/BAB%20I.pdf>

<https://www.dfat.gov.au/trade/agreements/in-force/iacepa/Pages/using-ia-cepa-do-business-indonesia>

<https://agroindonesia.co.id/2019/03/ia-cepa-perbesar-impor-sapi/>

<https://kemlu.go.id/canberra/id/news/7062/kerja-sama-ekonomi-indonesia-australia-tetap-solid-di-tengah-pandemi-global-covid-19>

www.aph.gov.au

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/02/10/berapa-perdagangan-dan-investasi-indonesia-dengan-australia>

<https://www.ceicdata.com/id/indicator/australia/trade-balance>

<https://www.ilfa.or.id/assets/uploads/FS-FAQ%20of%20IA-CEPA%20as%20of%2025%20Feb%20rev.pdf>

<https://www.dfat.gov.au/trade/agreements/in-force/iacepa/iacepa-text/Pages/iacepa-appendix-2-a-1-tariff-rate-quotas>

LAMPIRAN

Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimana realisasi komitmen masing-masing negara dalam mencapai kesepakatan IA-CEPA?
2. Bagaimana implikasi pandemi terhadap realisasi perjanjian IA-CEPA?
3. Bagaimana upaya yang harus dilakukan kedua negara dalam meningkatkan diplomasi dagang antara 2 negara ini?
4. Bagaimana kontribusi kita sebagai warga negara dalam menyukseskan perjanjian IA-CEPA?